

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan Kota Ambon pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat menuju kemandirian. Dalam konsep pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan upaya untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinamisnya kehidupan masyarakat Kota Ambon serta terus meningkatnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Ambon dituntut untuk dapat terus meningkatkan pembangunan pada seluruh aspek guna peningkatan harmonisasi sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon dengan melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tahun 2016 telah mencapai 79,55 (tertinggi di Maluku) sementara IPM Provinsi Maluku hanya sebesar 67,60. IPM Kota Ambon meningkat terus, dimana tahun 2012 sebesar 77,49 meningkat menjadi 78,16 di tahun 2013, di tahun 2014 menjadi 79,09, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 79,30. Namun demikian, sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Kota Ambon merupakan kota yang multifungsi, sampai saat ini masih tetap memiliki banyak permasalahan, baik permasalahan eksternal maupun permasalahan internal.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Ambon meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi.

Berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan yang berkembang di Kota Ambon, berdasarkan urusan pembangunan yang disebutkan di atas sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fondasi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Apabila kualitas pendidikan bagus, maka kualitas SDM akan sekaligus bagus. Secara umum, permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum meratanya akses dan kualitas pendidikan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan belum maksimal karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas mutu pendidikan yang belum seimbang. Disamping itu masih terdapat anak putus sekolah dan pelaksanaan pendidikan karakter belum yang belum optimal, pendidikan lingkungan hidup belum terintegrasi dalam kurikulum sekolah serta belum adanya keberpihakan dunia pendidikan pada anak penyandang disabilitas.

Urusan Kesehatan

Fondasi lainnya dalam memberikan sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kesehatan. Apabila kualitas kesehatan masyarakat baik maka otomatis berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan. Secara umum permasalahan kesehatan di Kota Ambon yang dapat diidentifikasi adalah penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia cenderung meningkat, cakupan jaminan kesehatan belum optimal sehingga belum menjangkau seluruh warga Kota, pelayanan kesehatan ke masyarakat belum optimal, masih tingginya jumlah penderita HIV/AIDS dan jumlah penyalahgunaan narkoba, masih adanya penyakit menular (demam berdarah/DBD, dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, serta diare), belum mencukupinya rasio tenaga kesehatan di puskesmas, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi, fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai serta penanganan limbah medis belum optimal.

Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan

Infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan Kota Ambon yang berperan vital tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi, namun turut membentuk perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam mengartikulasikan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Ambon dalam urusan Pekerjaan Umum adalah menyangkut pembangunan jalan dan umur pakai jalan, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit.

Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya.

Kegiatan penataan ruang dan perumahan dilaksanakan dalam rangka menata fungsi – fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahnya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang berupa interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya Ambon Manise sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon.

Secara umum permasalahan yang terkait dengan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan di Kota Ambon yang dapat diidentifikasi adalah bahwa kondisi jaringan utilitas infrastruktur wilayah masih belum terpadu, kondisi jaringan jalan maupun jalan lingkungan beserta utilitasnya serta fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan masih ada yang belum tertata dengan baik, kondisi jaringan pedestrian masih kurang memadai, disamping itu masih kurang tersedia ruang terbuka hijau, demikian pula dengan luasan dan sebaran ruang public masih terbatas, masih terdapatnya beberapa kawasan kumuh di Kota Ambon yang berimplikasi pada penataan hunian permukiman yang layak (rumah sehat) dengan akses sanitasi pemukiman yang memadai belum terbangun secara optimal, disamping masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi drainase dan prasarana lainnya masih ada yang belum selaras dengan tata ruang sehingga menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir dan longsor.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masih belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya manfaat sumber daya air yang berkelanjutan, demikian pula dengan persoalan air minum yang pelayanannya masih kurang sehingga perlu peningkatan terhadap pelayanannya terutama yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pengalirannya pada rumah-rumah tangga masyarakat Kota Ambon.

Urusan Perhubungan

Sarana transportasi darat dan laut di Kota Ambon berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan

dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah di Kota Ambon seperti kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri.

Secara umum permasalahan perhubungan di Kota Ambon yang dapat diidentifikasi adalah bahwa Tingkat kemacetan di beberapa titik maupun kemacetan pada hari tertentu semakin tinggi. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas dan kondisi jalan yang kurang mendukung, Kondisi arus lalu lintas di Kota Ambon yang semakin hari semakin padat, serta banyaknya pemakai jalan yang tidak tertib dalam berlalu lintas dan pada beberapa ruas jalan dan persimpangan tertentu terjadi kemacetan bahkan sampai kecelakaan yang menyebabkan kerugian material maupun non material, Rendahnya disiplin pengguna jalan dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, Ketersediaan area parkir dan tata kelola perparkiran yang belum memadai, serta Masih belum memadainya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, dan lain-lain).

Urusan Lingkungan Hidup

Agar pembangunan di Kota Ambon bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan menghadapi berbagai kendala, yaitu adanya kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam aktivitas pembangunan, belum adanya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya.

Pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Kota Ambon karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kota Ambon dalam urusan lingkungan hidup antara lain adalah Masih terjadinya ancaman banjir, timbunan sampah terutama sampah plastik pada saluran-saluran air dan perairan teluk Ambon, limbah domestik, abrasi pantai, ancaman interusi air laut akibat banyaknya sumur dalam/sumur bor, terjadinya kerusakan terumbu karang akibat akitifitas masyarakat atau kematian akibat tertutupnya permukaan karang dengan sampah plastik, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, tercemarnya air sungai dan air tanah, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim. Disamping itu masih terjadinya kerusakan kawasan resapan akibat alih fungsi lahan, Kerusakan kawasan lindung sempadan sungai akibat pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali dan masih terdapat kawasan berpotensi kekeringan.

Urusan Pertanahan

Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan dalam pengelolaan pertanahan di Kota Ambon. Secara umum permasalahan pertanahan yang dihadapi Kota Ambon antara lain adalah belum optimalnya pendataan pertanahan aset daerah sehingga sering menimbulkan konflik pertanahan di masyarakat, demikian juga dengan masih banyaknya tanah-tanah yang belum bersertifikat.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan daerah, namun jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi beban pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya. Untuk itu perlu suatu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk sehingga penduduk yang berkualitas untuk pembangunan dapat diwujudkan. Pengolahan data kependudukan, pemutahiran data, pengendalian mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Adapun permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ambon antara lain adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Ambon diantaranya adalah karena imigrasi penduduk, Masih adanya masyarakat yang belum memahami dan sadar mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan manfaat dokumen kependudukan sehingga cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka di masa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat (bonus demografi). Hal dapat menjadi beban pembangunan, bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat, sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan Kota Ambon yang kecil.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan masih perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan dengan masih terbatasnya peran perempuan dalam pembangunan, masih banyaknya angka tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum beberapa permasalahan pemberdayaan perempuan di Kota Ambon yang dapat diidentifikasi antara lain adalah: adanya pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja, peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai, dan masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan baik secara fisik maupun secara verbal.

Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera

Pada prinsipnya sasaran dari program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah untuk menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kematian total, menurunkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kota Ambon dalam program KB dan keluarga sejahtera antara lain adalah: masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber KB dan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga serta masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi.

Urusan Sosial

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini adalah masih kurangnya sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, belum adanya pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat *by name-by adress*, masih kurangnya identifikasi mendalam terhadap permasalahan yang menyangkut *penyandang masalah kesejahteraan social* dan juga penanganan trauma pasca bencana yang belum terkordinasi secara optimal.

Urusan Tenaga Kerja

Kalau kita boleh berpandangan prospektif maka kita dapat berasumsi bahwa tenaga kerja adalah kunci bagi pergerakan perekonomian daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. Posisi Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku merupakan lintasan jalur ekonomi regional Maluku dan wilayah sekitarnya membuka peluang bagi terbentuknya ekonomi baru dan fungsi Kota Ambon sebagai kota niaga, kota jasa dan kota pendidikan. Hal ini pasti membutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

Namun demikian, sehubungan dengan posisi dan fungsi kota Ambon sebagai kota niaga, kota jasa dan kota pendidikan maka Kota Ambon menghadapi beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja, masih minimnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja, serta jumlah angkatan kerja masih jauh lebih tinggi dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Pada saat dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi, yaitu saat terjadinya krisis moneter akibat pengaruh ekonomi global, sektor usaha mikro dan kecil ternyata mampu bertahan terhadap badai krisis ekonomi global yang menimpa Indonesia tersebut termasuk Kota Ambon. Oleh karena itu, penting sekali untuk membangkitkan pembangunan ekonomi kota yang berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal yang tersedia maka diperlukan program-program penguatan atau pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil dan koperasi.

Namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi sektor ini yang secara umum dapat diidentifikasi adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengelola koperasi dan usaha mikro kecil (KUMK), masih banyak koperasi yang tidak aktif, demikian pula dengan aspek permodalan, pemasaran dan daya saing KUMK yang masih lemah.

Urusan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Ambon diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan. Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi; Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi; dan Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang.

Sedangkan Permasalahan di bidang perdagangan adalah masih kurang optimalnya sistem logistik, kurang tersedianya fasilitas perdagangan seperti pergudangan yang memadai, kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik. Sementara itu, di bidang perindustrian permasalahannya adalah masih terbatasnya bahan baku untuk industri, teknologi yang digunakan belum berkembang, dan rendahnya sumber daya manusia yang berdampak pada tidak adanya *branding industry* Kota Ambon yang menonjol, serta infrastuktur promosi yang belum memadai.

Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekuatan pembangunan. Kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat akan menjadi kohesi lintas pemangku kepentingan yang tercerberaikan untuk bisa dipersatukan menjadi potensi kekuatan pembangunan.

Secara umum teridentifikasi permasalahan urusan kebudayaan adalah masih bahwa masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi (pelestarian nilai budaya), demikian pula dengan belum optimalnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya dan cagar budaya, serta belum berkembangnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya.

Demikian pula masih teridentifikasi rendahnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda terhadap budaya lokal karena sistem pembinaan pengelolaan kesenian berjalan belum optimal sehingga terkisahnya nilai-nilai kearifan lokal dikalangan generasi muda serta terbatasnya ruang publik untuk tempat berkeaktifitas mengekspresikan kesenian dan budaya lokal.

Urusan Pemuda dan Olahraga

Dalam perspektif pembangunan suatu negara, Pemuda merupakan salah satu modal dan tumpuan masa depan Negara bersangkutan. Berdasarkan struktur usia penduduk, Kota Ambon memiliki jumlah penduduk berusia produktif (pemuda) lebih dari 60%. Tentu ini menjadi peluang dan kekuatan bagi masa depan Kota Ambon yang lebih baik. Sebaliknya, keberadaan pemuda bisa menjadi beban pembangunan jika para pemuda yang ada tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dinamika pembangunan. Dalam kerangka membangun pemuda yang produktif dan bersumbangsih positif bagi pembangunan Kota Ambon, pembangunan kepemudaan menghadapi berbagai permasalahan, yakni terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda, kurangnya event olahraga, dan rendahnya prestasi olahraga.

Di sisi lain pembangunan olahraga menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk insan pembangunan. Namun, pembangunan olah raga di Kota Ambon teridentifikasi menghadapi berbagai masalah antara lain adalah masih keterbatasannya fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kurang optimalnya pembinaan olahraga baik olahraga pelajar, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, kurangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan terutama pada cabang olahraga unggulan.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Ambon yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Ambon merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik.

Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah Kota Ambon dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Secara umum permasalahan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Ambon antara lain meliputi Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah dan yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya, Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung Penertiban Pelanggaran, masih adanya kepentingan-kepentingan lain dalam

masyarakat sehingga cenderung menimbulkan gangguan ketertiban umum dan konflik social di masyarakat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.

Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara umum permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan adalah sistem manajemen pemerintahan yang kurang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur, peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol, sistem pengendalian dan pengawasan yang akuntabel dan transparan, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja; belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur; dan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan public sehingga belum terpenuhinya pelayanan publik lebih cepat, mudah, murah dan transparan, masih adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih, belum adanya sinergi antar tingkat pemerintahan, belum optimalnya penyelenggaraan berbasis pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga berpengaruh pada pemeringkatan penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sementara, pembangunan desa menghadapi berbagai permasalahan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya di desa.

Disisi lain, masih belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, demikian pula masih kurangnya jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memenuhi syarat/bersertifikasi. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, kurangnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota, belum optimalnya pengelolaan barang daerah, serta belum optimalnya penataan dan pendayagunaan aset daerah sehingga berpengaruh pada opini BPK.

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pemberdayaan masyarakat di Kota Ambon lebih banyak diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa/negeri dan kelurahan. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam

pembangunan juga menjadi sebagian tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan pembangunan pemberdayaan masyarakat di Kota Ambon antara lain adalah Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/negeri, dan tata kelola pemerintahan desa/negeri masih belum optimal sehingga masih perlu terus ditingkatkan, serta belum fokus dan belum bersinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah desa/negeri.

Urusan statistik

Salah satu hal urgen dalam pembangunan adalah tersediaan data dan informasi yang akurat untuk kebutuhan perencanaan kota. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Ambon dalam urusan data statistik antara lain adalah Kuantitas akurasi data sektoral dari SKPD yang masih kurang konsisten, dan masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan, serta masih belum optimalnya sistem informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan kota.

Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Perpustakaan, arsip dan dokumentasi memiliki nilai yang sangat strategis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan arsip dan dokumentasi berbanding lurus dengan akuntabilitasnya. Artinya, semakin baik pengelolaan arsip semakin tinggi akuntabilitasnya, demikian sebaliknya, semakin buruk pengelolaan arsip akan semakin buruk pula tingkat akuntabilitasnya.

Semua kegiatan dalam sebuah organisasi terutama dalam instansi pemerintah terekam dalam arsip. Di mana rekaman kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pertanggungjawaban dan pengembangan instansi yang bersangkutan. Arsip merupakan aset negara yang berharga. Arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara serta dilestarikan, karena tingkat keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsip. Keberadaan Arsip merupakan satu hal yang sangat penting, baik untuk kepentingan masa kini, masa depan, maupun untuk merekonstruksi masa lampau.

Sebagai fasilitas interaksi individu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan melalui potensinya dapat membangun kepribadian luhur, meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Oleh karena itu, perpustakaan juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, preservasi, dan rekreasi dalam penguatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Sehubungan dengan hal itu secara umum Permasalahan urusan kearsipan dan perpustakaan antara lain adalah: kurang tertatanya sistem administrasi kearsipan, belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, kurang terpeliharanya secara rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, rendahnya kualitas pelayanan informasi, serta belum berkembangnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam pergaulan antar negara di zaman globalisasi. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Adapun Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Ambon secara umum adalah, pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh fasilitas umum Kota Ambon guna mendukung *Smart City*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan *public*, (*e-goverment*, *e-city*, *e-planning*, *e-budgeting*, dll) belum dikembangkan guna mendukung *Ambon Smart City*.

Urusan pertanian dan ketahanan pangan

Sektor pertanian di Kota Ambon, masih memegang peranan penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan pertanian yang semakin menyempit, perlu terus diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus meningkat.

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan kota.

Adapun beberapa permasalahan dibidang pertanian di Kota Ambon dapat diidentifikasi adalah masih belum optimalnya produksi pertanian dan perkebunan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sayuran dan buah, dilain pihan lahan pertanian yang semakin menyempit, perlu terus diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus meningkat.

Disisi lain, beberapa permasalahan di bidang ketahanan pangan di Kota Ambon adalah ketersediaan dan keragaman bahan pangan masih

terbatas, demikian pula dengan produktivitas bahan pangan terutama bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masih sangat rendah sehingga harus di datangkan dari luar kota.

Urusan Perikanan

Kota Ambon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang prospektif. Kedua sumber daya ini ke depan bisa menjadi pilihan utama pengembangan perekonomian kota. Namun, hingga saat ini kedua sumber daya tersebut belum digali secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan secara umum adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana, terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, tingginya tingkat pencemaran lingkungan di teluk Ambon, demikian pula dengan tingginya sedimentasi muara dan alur 5 (lima) sungai besar yang ada di Kota Ambon.

Urusan Pariwisata

Permasalahan urusan pariwisata di Kota Ambon diidentifikasi meliputi kurangnya promosi dan pemasaran pariwisata, belum optimalnya pengembangan destinasi wisata, serta belum berkembangnya kemitraan. Selain itu, permasalahan pariwisata Kota Ambon adalah masih belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pariwisata di destinasi wisata dan pemasaran Pariwisata, demikian pula dengan permasalahan yang menyangkut ketersediaan prasarana zona/ruang kreatif untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi serta masih rendahnya kemampuan dan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.2. Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu- isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai permasalahan di pada ke tiga aspek pembangunan, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Kota Ambon tahun 2017-2022 adalah:

1. Urusan Pendidikan:
 - a. Jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan.
 - b. Biaya penyelenggaraan pendidikan
 - c. Relevansi dan daya saing pendidikan dasar
 - d. Pendidikan karakter berbasis moral dan budi pekerti
2. Urusan Kesehatan:
 - a. Derajat kesehatan masyarakat
 - b. Jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan
 - c. Ambon sehat
 - d. E-Health (Sistem Informasi Kesehatan)

3. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Banjir dan longsor
 - b. Kelancaran arus barang dan jasa
 - c. Air minum, air limbah dan drainase,
 - d. Peningkatan kualitas dan Kapasitas jalan
 - e. Pedestrian
 - f. Ketimpangan pertumbuhan wilayah
 - g. Penerangan Jalan Umum

4. Urusan Penataan Ruang
 - a. Alih Fungsi Lahan
 - b. Bangunan Liar
 - c. Ketidaksesuaian tata ruang
 - d. Keserasian pembangunan wilayah perbatasan

5. Urusan Perumahan
 - a. Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - b. Kepemilikan rumah
 - c. Keterbatasan Lahan Perumahan Permukiman
 - d. Tempat pemakaman umum

6. Urusan Perhubungan
 - a. Moda Transportasi darat dan laut
 - b. Kemacetan lalu lintas
 - c. Keselamatan lalu lintas
 - d. Sarana prasarana perhubungan darat dan laut
 - e. Perparkiran

7. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Erosi, Abrasi, reklamasi pantai, pengelolaan pesisir dan teluk Ambon
 - b. Dampak Perubahan Iklim
 - c. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - d. Pengelolaan Persampahan
 - e. Pengelolaan resiko Dampak bencana
 - f. Meluasnya Alih fungsi lahan

8. Urusan Pertanahan
 - a. Konflik dan pemanfaatan tanah
 - b. Kepemilikan lahan

9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Migrasi dan Urbanisasi
 - b. Administrasi Kependudukan

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Pengarusutamaan Gender
 - b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - c. Diskriminasi, Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak
 - d. Kota Layak Anak

11. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera
 - a. Pengendalian Angka Kelahiran (TFR)
 - b. Kesehatan Reproduksi
 - c. Mobilitas penduduk
 - d. Ketahanan keluarga
 - e. Kelembagaan Kependudukan dan KB
 - f. Data dan sistem informasi Kependudukan dan KB

12. Urusan Sosial
 - a. Kemiskinan
 - b. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
 - c. Trauma pasca bencana

13. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Pengangguran
 - b. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - c. Pengendalian tenaga kerja antar daerah dan tenaga kerja asing
 - d. Penyelesaian Sengketa perburuhan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
 - f. Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja

14. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Penguatan kapasitas koperasi dan usaha mikro
 - b. Perlindungan pelaku usaha mikro

15. Urusan Penanaman Modal
 - a. Daya Saing Daerah
 - b. Infrastruktur industri

16. Urusan Budaya
 - a. Nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat
 - b. Cagar budaya dan bangunan bersejarah

17. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - a. Prestasi dan budaya olah raga
 - b. Potensi dan partisipasi pemuda
 - c. Sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

18. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - a. Penegakan peraturan daerah
 - b. Kualitas Perlindungan masyarakat
 - c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

19. Urusan Pemerintahan
 - a. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu
 - b. Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara
 - c. Pelayanan public
 - d. *City Branding*
 - e. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - f. Rasio kemandirian daerah
 - g. Pembudayaan zona integritas
 - h. Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - i. Pengelolaan keuangan daerah dan Asset Daerah serta pengendalian intern pemerintah
 - j. Profesionalisme Birokrasi
 - k. Budaya Kerja Birokrasi
 - l. Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
 - m. Kerjasama lintas sektor dan antar daerah
 - n. Pengendalian inflasi daerah
 - o. Pengadaan barang dan jasa yang akuntabel

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
 - b. Budaya *Masohi* (gotong royong) membangun kemandirian desa.
 - c. Pengelolaan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa
 - d. Pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa

21. Urusan Statistik
 - a. Akurasi data base pembangunan
 - b. Unifikasi dan kodifikasi data
22. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
 - a. Inventarisasi arsip
 - b. Minat baca
 - c. Rumah Pintar
 - d. Perpustakaan digital

23. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Keterbukaan informasi publik
 - b. Perkembangan Teknologi Informatika (*E-Gov* dan *E-city*)
 - c. Keamanan Siber dan berita hoax
 - d. Pengamanan informasi pemerintah daerah

24. Urusan Ketahanan Pangan
 - a. Ketersediaan bahan pangan
 - b. Keanekaragaman pangan

25. Urusan Pertanian
 - a. Penyediaan bahan pangan pertanian
 - b. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian
 - c. Kualitas komoditi perkebunan
 - d. Agrowisata
 - e. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit zoonosis
 - f. Ketersediaan pangan hewani ASSUH (Aman, Sehat, Segar, Utuh dan Halal).

26. Urusan Perikanan
 - a. Pengolahan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan
 - b. Pengembangan lahan budidaya perikanan

27. Urusan Perdagangan
 - a. Revitalisasi pasar tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - c. Pengembangan pasar mardika/Batu Merah semi modern (retail modern)
 - d. Pergudangan dan pengawasan perdagangan
 - e. Pengendalian harga barang komoditi

28. Urusan Perindustrian
 - a. Pengembangan Sentra industri kecil dan menengah
 - b. Ketersediaan bahan baku penunjang industry
 - c. *City branding industri*
 - d. Promosi produk unggulan daerah (dekranasda Kota Ambon)

29. Urusan Pariwisata
 - a. Pengembangan dan promosi destinasi pariwisata
 - b. Kuantitas kunjungan wisatawan
 - c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata
 - d. Kapasitas manajemen kepariwisataan
 - e. pengembangan daya saing industry pariwisata
 - f. Pengembangan Ambon sebagai Kota Musik Dunia
 - g. Visit Ambon 2020